



Volume 5 Nomor 1 (2020) Pages 15 – 25

Misykah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

Email Journal : misykah.bbc@gmail.com

Web Journal : <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/misykah>



Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Negara

Ahmad Fadholi^{1✉}

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹

Email : ahmadfadholi@gmail.com¹

Received: 2019-09-25; Accepted: 2019- 10-15; Published: 2020-02-28

Abstrak

Muhammad adalah sosok manusia agung utusan Tuhan yang diberikan amanah menyampaikan risalah, atau ajaran Tuhan, yang kemudian dikenal dengan ajaran Islam. Akhlaknya yang mulia menarik simpati masyarakat arab kala itu, meskipun sebagian kalangan resah dengan keberadaannya. Sebagai manusia pilihan, ia dibekali dengan ilmu dan kemampuan. Tuhan pun memberikan kedudukan mulia di antara manusia dengan memberikannya gelar kenabian. Kedudukan mulia ini menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar sang utusan Tuhan. Selain itu, kepiawaian Nabi Muhammad dan kepercayaannya di mata masyarakat dalam hal mengatur, menjaga, mengembangkan wilayah kekuasaan, membangun kota-kota, memberikan perhatian, kedamaian, kesejahteraan serta kemajuan masyarakat, menjadikannya layak disebut sebagai “negarawan”. Dalam mengimplementasikan ajaran, mengatur roda kehidupan dan pemerintahan, ia menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dan juga prinsip kasih sayang terhadap seluruh alam.

Kata Kunci : *Pimpinan Agama, Kepala Negara, Muhammad*

Abstract

Muhammad is a great human figure, the messenger of God who was given the mandate to deliver the message, or teachings of God, which became known as the teachings of Islam. His noble character attracted the sympathy of the Arab community at that time, even though some people were uneasy about his existence. As a chosen human, he is equipped with knowledge and abilities. God also gave him a noble position among humans by giving him the title of prophecy. This noble position shows that he is truly the messenger of God. In addition, the expertise of the Prophet Muhammad and his belief in the eyes of the people in regulating, maintaining, developing the territory, building cities, giving attention, peace, welfare and progress of society, made him worthy of being called a "statesman". In implementing teachings, regulating the wheels of life and government, he applies the values of Islamic teachings and also the principle of compassion for all nature.

Keywords: *Head of Religion, Head of State, Muhammad*

Copyright © 2020 Misykah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Muhammad, nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim, lahir di Mekkah, 20 April 570 M. dan meninggal di Madinah, 8 Juni 632 M. Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul bagi umat muslim. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah agama Islam, sebagai utusan Tuhan beliau dibekali *al-Kitab* sebagai pedoman hidup umat manusia berupa Al-quran.

Nabi Muhammad Saw. diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ʿālamīn*). Dalam mengemban risalah (ajaran Islam), beliau mempunyai misi-misi dalam menyebarkan dakwahnya. Di antara misi-misinya adalah untuk menyeru kepada tauhid, menyembah Allah yang satu, menyempurnakan akhlak, menghapus perbedaan kasta sosial, pembawa kedamaian, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad Saw. juga dikenal sebagai figur central bagi umat Islam dan tempat mengadu keadilan bagi non-muslim. Dalam kiprahnya sebagai figur central, beliau menyandang berbagai macam posisi yaitu posisi sebagai Nabi dan Rasul, sebagai negarawan, sebagai manusia biasa, sebagai pemimpin keluarga, dan posisi lainnya.

Pada kajian ini penulis akan menghadirkan pembahasan tentang posisi Muhammad sebagai Nabi dan Negarawan. Dalam hal ini apakah terdapat perintah Tuhan dalam membangun negara atau mungkin itu hanya ijtihadnya Nabi? Selanjutnya bentuk negara apa yang layak dikatakan pada masa itu?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya.¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (Content Analysis). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya.² Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan.

Untuk menjaga kekelan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis² informasi (Kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan komentar pembimbing.

¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, 1 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

² Klaus Krippendoff, *Analisis Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*. (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Muhammad sebagai Nabi dan Rasul

Nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyu-Nya, adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yaitu untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya.

Sebagai Rasul yang diutus membawa ajaran dari Allah Swt. yang akan memberikan teladan hidup bagi umatnya, secara logika Rasul Saw. harus sebagai manusia biasa yang akan memberikan contoh perilaku kehidupan yang kongkret bagi umat manusia. Jika tidak nyata, apalah artinya fungsi sebagai Nabi jika keteladanannya tidak bisa dipraktikkan dalam kehidupan norma manusia. Secara filosofis, Allah Swt. tidak menghendaki untuk mengirim utusan-Nya yang bukan manusia biasa, melainkan manusia biasa yang terdiri dari tulang, daging dan darah yang suatu saat akan meninggal dunia dan tidak akan berubah dari tabiat kemanusiaannya pada tabiat lainnya. Misalnya Malaikat, bagaimanapun sucinya Malaikat, baik dalam pandangan Tuhan maupun dalam pandangan manusia, ia tetap bukan contoh yang paling layak untuk diteladani oleh manusia.³

Posisi Nabi dan Rasul adalah posisi tertinggi di sisi Allah Swt., wahyu yang berupa Al-quran diberikannya kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pedoman hidup manusia. Muhammad sebagai Nabi dan Rasul menjadi suri teladan bagi umat manusia, sehingga sebagai pembawa Al-quran, ia harus menjadi orang yang pertama kali mempraktekkan sesuai apa yang Allah wahyukan. Nabi-pun memimpin shalat dan menyampaikan berbagai khutbah, mempraktekkan bagaimana cara beribadah dan bermu'amalah sesuai syariat Islam serta meletakkan prinsip-prinsip agama Islam. Karenaya ketika sahabat bertanya tentang hal ihwal Rasulallah, dijawab Siti Aisyah bahwa akhlak Rasulallah adalah Al-quran.

Sebagai Nabi, ia menyeru kepada tauhid untuk meng-Esakan Allah Swt. bahwa tidak ada tuhan yang patut untuk disembah selain Allah, adapun menganggap ciptaan yang dianggap memiliki kekuatan Tuhan adalah perbuatan syirik dan mendapat murka Allah Swt. di samping mengajarkan tauhid dan bagaimana beretika dengan Allah, Nabi juga mengajarkan kepada manusia khususnya kaum muslimin bagaimana beretika dengan manusia, keluarga dan lingkungan. Maka sangatlah layak ketika dikatakan misi Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak dalam rangka membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Dalam sebuah hadits, Rasulallah Saw. bersabda: *“Sesungguhnya Aku (Muhammad) diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak.”* (H.R. Ahmad dan Baihaqi).

Pengertian akhlak sendiri sebagaimana yang dikemukakan Farid Ma'ruf yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan definisi akhlak oleh Ibnu Maskawaih, al-Ghazali dan Ahmad Amin ialah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.⁴

Misi Nabi Muhammad Saw. dalam segala hal selalu mengedepankan nilai-nilai akhlak yang mulia, inilah yang membedakan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lain selain anugerah akal. Firman Allah Swt. : *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”* (QS. al-Isra:17; 70).

³ Lihat Badri Khaeruman, *Ulum al-Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 19

⁴A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, Cet. VI (Bandung:CV Pustaka Setia, 2014), h. 14

Manusia dengan akalnyanya bisa saja menjadikannya pandai dan cerdas, misalnya ia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jabatan yang tinggi dan kekayaan yang melimpah, namun apabila ia tidak bermoral, maka yang muncul bukanlah kemaslahatan (kebaikan), melainkan kemafsadatan (kerusakan, keburukan), bahkan bisa mengancam dirinya sendiri.

Ketampanan dan kecantikan seseorang bisa saja menjadikannya populer dan menjadi idola bagi penggemarnya, namun apabila tidak bermoral, maka hanya akan menjadi penyakit dan sampah masyarakat. Misalnya terjadi kemaksiatan, perzinahan, tindakan asusila dan sejenisnya yang akan merusak masyarakat dan bangsa.

Pokok persoalan akhlak bertumpu pada kecenderungan seseorang menganggap bahwa satu-satunya yang dapat membahagiakan hidupnya adalah nilai material, sehingga manusia terlampau mengejar materi, tanpa menghiraukan nilai-nilai spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan akhlak manusia. Karenanya manusia mudah terjerumus ke berbagai penyelewengan dan kerusakan akhlak, seperti melakukan perampasan hak orang lain, penyelewengan seksual dan pembunuhan. Nilai spiritual yang dimaksudkan dalam Islam adalah ajaran agama yang berwujud perintah, larangan dan anjuran, yang mana kesemuanya berfungsi untuk membina kepribadian manusia dalam kaitannya sebagai hamba Allah serta anggota masyarakat.⁵

Akhlak yang menjadi salah satu misi Nabi adalah untuk membangun manusia yang mulia, di mana kemuliaan tersebut tidak hanya untuk diri sendiri melainkan bisa menjadi teladan dan bermanfaat bagi yang lain. Sebagaimana dalam sabdanya: “... *Dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik.*” (H.R. Turmudzi). Dalam hadits lain disebutkan, “*Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada manusia (yang lain).*”

Nabi Muhammad Saw. diutus oleh Allah Swt. bukan untuk mengutuk, melainkan untuk menebar kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan, bukan hanya untuk kaum muslimin, tidak pula orang arab, tetapi untuk segenap makhluk alam semesta. Al-quran menyebutkan: “*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.* (QS. al-Anbiya (21) : 107).

Alam semesta tidak terbatas pada bumi ini saja, tetapi juga meliputi planet-planet yang lain, karena di dalamnya juga terdapat makhluk Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt.: “*Di antara (ayat-ayat) tanda-tanda-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata Yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya.*” (QS. Asy-Syura: 42;29). “*Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri.*” (QS. An-Nahl: 16;49)

Misi Nabi Muhammad Saw. meliputi seluruh alam, karenanya tidak perlu lagi diutus Nabi dan Rasul lain yang akan menyampaikan misi kepada mereka, sehingga Nabi Muhammad dikatakan sebagai Nabi dan Rasul terakhir, atau sebagai penutup para Nabi dan Rasul.

⁵*Ibid.*, h. 17

2. Muhammad sebagai Negarawan

Dalam teori dan praktek, Nabi menempati suatu posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber undang-undang spiritual Ketuhanan, sekaligus juga pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Dalam kerangka sejarah telah ditegaskan bahwa sejak hijrah ke Madinah tahun 522 M sampai saat wafat pada 8 Juni 632 M., Muhammad Saw. berperan sebagai pemimpin yang tidak dibantah (*unquestionable leader*) bagi negara Islam yang baru lahir itu. Menurut Karen Armstrong Nabi Muhammad bukan hanya cerdas spiritual, bahkan ia juga memiliki bakat politik pada setiap perintah agung. “*He was not just a spiritual genius, but he also had political gifts of a very high order.*”

Sebagai negarawan, Nabi Muhammad Saw. membangun kekuatan dengan cara mempersatukan umat, menghapus perbedaan kasta, menyeimbangkan perekonomian, menegakkan keadilan, membentuk angkatan perang, membagikan rampasan perang dan melakukan ekspansi daerah. Non-muslim yang tunduk pada aturan Islam, mereka diberi kelayakan untuk hidup bersama, bahkan Nabi dijadikan tumpuan untuk diminta pendapat dan memberikan kebijakan bagi non-muslim yang menuntut hak dan keadilan.

Pasca Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah, beliau tampil sebagai pemimpin masyarakat yang oleh sejumlah pakar digambarkan sebagai negara. Hal itu karena terpenuhinya unsur-unsur negara di dalamnya seperti: adanya wilayah, penduduk, pemerintahan dan kedaulatan. Oleh karena itu, Montgomery Watt dalam bukunya *Muhammad Prophet and Statesman* menyatakan bahwa Muhammad Saw. bukan hanya Nabi tetapi juga kepala negara (negarawan).⁶

Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Pandangan ini juga sepaham dengan pemikiran Rasyid Ridha, Hasan al-Bana dan al-Maududi, sebagaimana dikutip Munawir Sadzali⁷, mereka berpendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Di dalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Karenanya dalam bernegara, umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. dan *Khulafā al-Rāsyidin*.

Al-Farabbi seorang filosof muslim dan sekaligus ahli ilmu politik Islam mengatakan bahwa keistimewaan agama Islam ialah memberi pimpinan bagi urusan-urusan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, ibadah dan mu’amalah, soal-saol iman dan ilmu pengetahuan, ketuhanan dan kemanusiaan, persoalan masyarakat dan pribadi manusia. Dengan begitu, Islam merupakan agama yang lengkap sebagai pedoman bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk politik dan negara.⁸

Nurcholis Majid dalam pengantarnya atas karya Syafi’i Ma’arif menegaskan bahwa salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilannya ialah kejayaan

⁶ W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*, Oxford University Press, 1961, h. 94-95.

⁷ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), h. 1 dan 147

⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Madinatul Fadhilah: Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam al-Farabbi* (Jakarta: PT Kinta, 1968), h. 3

dibidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah kejayaan itu sejak Nabi Muhammad Saw. sendiri (periode Madinah) sampai masa-masa jauh sesudah beliau kreatif.⁹

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti sistem ketatanegaraan, secara sepintas dibenarkan oleh Al-quran, sebagaimana dinyatakan QS. Al-Maidah (5) ayat 3: *“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam menjadi agama bagimu.”* (QS. Al-Maidah: 5; 3)

Dalam menafsirkan ayat di atas, al-Thabari menyebutkan bahwa *ta’wil* ayat tersebut adalah Allah menyempurnakan kewajiban-kewajiban, hukum-hukum, perintah dan larangan, yang halal dan yang haram, dan berbagai ibadah yang berhubungan dengan urusan agama bagi manusia serta wahyu diturunkan kepada Rasul-Nya.¹⁰

Demikian juga ayat Al-quran: *“Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab”*. (QS. al-An’am: 38). Dalam ayat lain disebutkan, *“Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”*.

Pernyataan kedua ayat di atas, tidak berarti Al-quran mengandung sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya, tetapi yang dimaksud dengan *“Al-quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu dan di dalamnya tak luput sesuatu apa pun”* adalah berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan dan pokok-pokok kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹

Harun Naution sebagaimana dikutip J. Suyuthi Pulungan mengatakan bahwa ayat di atas harus diapresiasi mendukung pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif yang di dalamnya termasuk masalah politik dan kenegaraan. Ayat di atas mengandung arti bahwa Islam sebagai agama yang diwahyukan kepada para Nabi Adam a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s. sampai kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir, menjadi sempurna ajarannya, dan menjadi sempurna wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw.

Memang secara eksplisit Al-quran tidak menjelaskan bagaimana negara itu didirikan. Namun Al-quran mengintrodusir beberapa prinsip dasar bangunan suatu negara Islam. Banyak ayat-ayat Al-quran yang berbicara mengenai prinsip dasar kehidupan bernegara dan berbangsa serta bermasyarakat, seperti: prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan (QS. An-Nisa : 48), prinsip kepemimpinan (QS. Ali Imran: 118), prinsip musyawarah (QS. Ali Imran: 159), prinsip persatuan dan persaudaraan (QS. Ali Imran: 103), prinsip persamaan (QS. An-Nisa: 1), prinsip hidup bertetangga/hubungan antar negara bertetanga (QS. An-Nisa: 2), prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah (QS. Al-Maidah: 2), prinsip bela negara (QS. At-Taubah: 38) dan prinsip-prinsip lainnya yang kesemuanya hampir dikatakan bahwa Al-quran berbicara berbagai aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat menurut Islam.

Menurut Sayyid Aqil Siradj, bahwa dalam suatu hadits, menjelang Nabi Saw. wafat (11H./632 M.), beliau telah memberikan wejangan kepada kaum muslimin agar tidak

⁹Syafi’i Ma’arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. i

¹⁰Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayat Al-quran*, J. 6 (Mesir: Dar al-Fikr, 1984), h. 79-80.

¹¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah & Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1-2

terperosok dalam jurang kesesatan, hendaklah selalu menempatkan Kitabullah dan Sunnah Rasulnya sebagai referensi utama dalam setiap langkah hidupnya. Pesan tersebut memberikan ilustrasi akan cakupan Al-quran terhadap semua persoalan kehidupan, termasuk kehidupan politik, kenegaraan, kepemimpinan, dan kemasyarakatan.¹²

3. Periode Madinah

Studi sosiologi terhadap sejarah Nabi Muhammad Saw. cenderung memberikan kesimpulan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. dibedakan atas kedudukannya sebagai kepala Negara. Demikian ini karena memang terdapat perbedaan sosiologis dalam dua periode perjuangan Nabi Muhammad Saw. yang mana periode pertama (mekkah) lebih ditanggapi sebagai pemimpin agama pembawa risalah, sebaliknya dalam periode Madinah kegiatan dan usaha yang paling dominan adalah menata masyarakat Islam. Karena itu beliau ditanggapi sebagai pemimpin Negara (negarawan).

Mengenai masalah asas operasional kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. yaitu meliputi:¹³

- a. Iman yang kokoh Asas ini dipetik dari peristiwa-peristiwa yang dialami rasul seperti intimidasi Quraisy melalui Abu Thalib ataupun tawaran-tawaran dari Utbah bin Rabi'ah. Namun beliau tidak goyah sedikitpun dari segala ancaman dan bujukan musuh-musuhnya. Iman yang kokoh membuhkan kesetiaan dan kedisiplinan, dua sikap mental yang sangat diperlukan dalam suatu perjuangan besar bahkan merupakan syarat mutlak untuk mencapai kesuksesan.
- b. Keterampilan dalam Siyasa. Yang dimaksud adalah kemampuan dalam menganalisa situasi dan kondisi serta arif dalam mengambil kebijakan sehingga indikasinya, cita-cita akan tercapai dengan usaha-usaha yang efisien dan efektif. Keterampilan siyasa tampak pada peristiwa sejarah kehidupan rasul, antara lain ketika keluar dari Makkah, beliau tidak langsung ke Madinah, tetapi terlebih dahulu ke gua tsur selama 3 malam. Setelah itu baru melanjutkan perjalanannya ke Madinah pada hari berikutnya. Demikian pula siyasa yang terkandung dalam perjanjian Hudaibiyah menjadi data akan adanya asas operasional ini.
- c. Potensi dan Kekuatan fisik. Dua hal ini juga merupakan asas operasional perjuangan Nabi Muhammad Saw. Dalam menegakkan agama Islam. Kekuatan tidaklah mutlak harus purna dalam segala bidang, Akan tetapi kekuatan yang memadai akan menjadi modal bagi usaha-usaha perjuangan. Kekuatan mental sebagai buah dari iman belumlah mencukupi, demikian pula halnya ilmu pengetahuan semata belum memadai. Dari sejarah diketahui bahwa, potensi material dan fisik juga sangat mempengaruhi jalannya dakwah Nabi Muhammad Saw.

4. Bentuk Pemerintahan Madinah

Pemerintahan Islam di Madinah sudah membentuk sistem pemerintahan daerah hakim dan politik luar negeri. Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Satu hal yang paling penting dalam sistem politik Islam adalah bahwa kedaulatan itu tidak di tangan rakyat ataupun kepala negara (khalifah), tetapi di tangan syara' (aturan dan

¹²Sayyid Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), h. 37

¹³ Diakses dari Internet, 21 Januari 2016, tersedia dalam: <http://harapantiadaakhir.blogspot.co.id/2011/11/sistem-pemerintahan-islam-pada-masa.html>

hukum Islam). Sementara itu kekuasaan khalifah adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam. Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah Saw., semua pemikir muslim sepakat bahwa Madinah merupakan contoh negara Islam pertama. Tugas Rasulullah Saw. adalah memimpin masyarakat Islam sebagai utusan Allah SWT dan kepala negara Islam Madinah.

Awal terbentuknya negara Islam Madinah bermula dari konflik antar klan Arab (suku Aus dan Khazraj) yang kerap terjadi di wilayah jazirah Arab. Konflik yang terjadi pada masa itu bukan disebabkan perebutan kekuasaan, melainkan karena perebutan sumber air yang terdapat di luar wilayah kekuasaan masing-masing. Bagi mereka, air adalah sumber kehidupan dan kekayaan. Sumber air yang diperebutkan bernama Bu'bs, lembah yang terletak tidak jauh dari Yatsrib (Madinah). Konflik yang terus berkepanjangan ini, membuat masyarakat Arab Yatsrib khawatir keamanan wilayah mereka terancam dari kemungkinan serangan musuh. Kekhawatiran dan rasa tidak aman ini membuat masyarakat Yatsrib merindukan figur seorang tokoh pemimpin yang adil dan mampu menegakkan peraturan yang dapat diterima semua pihak. Oleh sebab itu, suku Aus dan Khazraj terus berusaha mencari tokoh yang diharapkan.¹⁴

Hasan Ibrahim Hasan dalam bukunya *al-Nudzum al-Islamiyah* menyatakan bahwa dilihat dari posisi Nabi sebagai Da'i, maka peran utama beliau adalah mengajak menegakkan syari'at, dan menjelaskan makna Al-quran yang kurang jelas melalui hadits Nabi. Tetapi tampilnya Nabi dalam kedudukan demikian mempunyai implikasi politis karena telah menjadikan mereka yang tinggal di jazirah Arab satu umat yang tunduk pada satu pemerintahan. Artinya, kalau dulu kabilah yang dijadikan dasar kesatuan politik kini dasar itu adalah umat. Pada saat Nabi dipercaya untuk memimpin umat, dibuatlah asas atau prinsip umum sebagai landasan berdirinya negara baru berikut perundang-undangannya (*qawanin*). Oleh karena itu, pemerintahan Rasul sampai batas tertentu adalah pemerintahan agama.

Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi modern dengan otoritas yang sangat tinggi, menilai bahwa Madinah Nabi merupakan model yang sangat modern untuk masyarakat pada masa itu. Masyarakat Madinah itu sangat modern dilihat dari tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi seluruh jenjang anggota masyarakat. Masyarakat Madinah itu juga modern karena kedudukan kepemimpinannya yang terbuka untuk kemampuan yang diuji atas dasar pertimbangan universal dan dilambangkan dalam percobaan melembagakan kepemimpinan tertinggi tidak berdasarkan keturunan. Menurut Bellah, Infra struktur dan kultur belum mendukung, "*The model of Medina state or society cannot be preserved in the long term because there isn't sufficient social infra structure and culture that able to support it.*"

Nurcholish Madjid dalam tulisannya yang berjudul *Cita-cita Politik Kita*, dengan tanpa memberikan rincian lebih jauh tentang sistem dan bentuk pemerintahan dalam Islam, menyatakan bahwa terpilihnya Nabi sebagai pemimpin di Madinah terjadi karena "proses demokratis".¹⁵ Madjid Khudluri mempunyai pendapat lain, dia menyatakan bahwa sistem

¹⁴ Diakses dari Internet, 21 Januari 2016, tersedia dalam: <http://www.republika.co.id/berita/hortlink/61542>

¹⁵ Nurcholis Madjid, "*Cita-cita Politik Kita*", Makalah, 1983, h. 12

pemerintahan dalam Islam meskipun mendekati teokrasi akan tetapi lebih baik bila disebut “nomokrasi”, yakni pemerintahan hukum di mana kedaulatan tertinggi ada pada hukum.¹⁶

Abdul Qadir Audah dalam bukunya *al-Islam wa Auwdla'una al-Siyasiyah* mengatakan, sesungguhnya pemeritahan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan corak pemerintahan lainnya, berbeda dengan setiap pemerintahan yang ada di dunia sekarang ini dan berbeda dengan pemerintahan yang pernah ada sebelumnya. Pemerintahan Islam bukan pemerintahan demokrasi karena Islam tidak membiarkan ukuran-ukura keadilan, persamaan dan lain-lain dari keutamaan manusia dirumuskan ketentuannya oleh manusia. Pemerintahan Islam menurutnya memiliki tiga sifat yang tidak dijumpai pada pemerintahan lain: *pertama*, pemerintahan qur'ani; *kedua*, pemerintahan musyawarah; *ketiga*, pemerintahan *khilafah* atau *imamah*.

Pemerintahan qur'ani yang dia maksudkan adalah pemerintahan yang tunduk kepada Al-quran yaitu Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw. Al-quran adalah konstitusi pemerintahan tertinggi. Yang dimaksud dengan musyawarah adalah memusyawarakan hal-hal yang belum *qath'i* (pasti). Adapun hal-hal yang *qath'i* adalah diluar bidang yang dimusyawarakan kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan pemerintahan khilafah adalah pemerintahan yang didirikan atas dua prinsip: *pertama*, taat kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya; *kedua*, prinsip musyawarah. Bila kedua prinsip ini bisa ditegakkan, maka bisa disebut pemeritahan Islam. Nama yang digunakan bisa *khilafah*, *imamah*, atau *mulk*.¹⁷

Al-Maududi berpendapat bahwa sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi. Karena dalam sistem demokrasi, kekuasaan negara itu sepenuhnya di tangan rakyat, dengan arti bahwa undang-undang atau hukum itu diundangkan, diubah atau diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut “teokrasi”, meskipun pengertian teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan teokrasi Eropa.

Munawir Sjadzali dalm *Islam dan Tata Negara* mengatakan, teokrasi Eropa adalah suatu sistem dimana kekuasaan negara berada pada kelas tertentu, kelas pendeta yang atas nama Tuhan menyusun dan mengundang undang-undang atau hukum untuk rakyat sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelas itu dan memerintah negara dengan berlindung di belakang “hukum-hukum Tuhan”. Sedangkan teokrasi dalam Islam, kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-quran dan sunnah Nabi. Atau dapat diciptakan istilah baru “teo-demokrasi”, karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedualatan rakyat yang terbatas.

Mengenai corak kepemimpinan Nabi Saw., ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan yaitu:

- a. Adanya musyawarah yang dilaksanakan oleh Nabi bersama para sahabat baik secara terbuka maupun secara terbatas, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak diatur oleh wahyu.
- b. Dalam melaksanakan keputusan-keputusan hukum, misalnya eksekusi hukuman, memeberi pengajaran kepada masyarakat dan juga dalam memimpin perang, beliau memeberi kuasa kepada sahabat-sahabatnya.

¹⁶ Ahmad Mahmud Shubhi, *Nadzariyatul Imamiyah lidzi Syi'ah Itsna'asyariyah* (Mesir, Darul Ma'arif, t.t.), h. 62.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Islam wa Auwdla'una al-Siyasah* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1951), h.72.

- c. Apabila beliau keluar kota untuk beberapa lama, misalnya untuk keperluan peperangan, beliau senantiasa mengangkat 'amil atas kota Madinah. Kadang-kadang beliau mengangkat dua orang, seorang wali dan seorang lagi untuk memimpin shalat, tetapi lebih banyak menunjuk 'amil tunggal, terutama apabila 'amil ini memiliki reputasi dalam bidang kepemimpinan masyarakat dalam bidang keagamaan.

D. KESIMPULAN

Muhammad diutus oleh Allah Swt. sebagai Nabi dan Rasul intinya adalah untuk menyempurnakan Akhlak. Karena akhlak menjadi titik sentral dalam setiap langkah hidup manusia, baik hubungannya dengan Tuhan, manusia, keluarga, ataupun lingkungan. Nabi juga layak dikatakan sebagai negarawan, karena Nabi Saw. dapat menjadi teladan bagi masyarakat (warga negara) nya, piawai dan terpercaya dalam hal mengatur, menjaga dan mengembangkan wilayah kekuasaan atau membangun kota-kota, memberikan perhatian, kedamaian, kesejahteraan serta kemajuan masyarakatnya.

Mengenai pemerintahan, pemerintahan Nabi saw. bukanlah pemerintahan otokrasi (kediktatoran), sekalipun ditangannya terletak kekuasaan tertinggi. Pemerintahan Nabi lebih dekat kepada teokrasi, di mana teokrasi dalam Islam, kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-quran dan sunnah Nabi. Namun lebih baik jika disebut disebut nomokrasi (pemerintahan hukum di mana kedaulatan tertinggi ada pada hukum). Hanya saja dalam sistem tersebut, umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang bebas. Mungkin lebih tepat sebagaimana dikatakan Munawar Sjadzali dengan penciptaan istilah baru yaitu “teo-demokrasi”, karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Nabi Muhammad dibantu oleh semacam staf yang berfungsi sebagai anggota musyawarah dan juga sebagai eksekutor. Nabi Muhammad Saw. memberi kemungkinan pemisahan kekuasaan pemerintahan. Melalui penamaan Madinah Munawarah, seakan-akan memberi kesan bahwa umat Islam dituntut untuk membentuk suatu negara dengan tidak memformalkan bentuk negara Islam, tetapi yang ditampilkan adalah nilai-nilai ajaran Islam dalam menjalankan roda pemerintahan (kenegaraan) dengan prinsip *rahmatan lil'ālamīn*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. 1968. *Madinatul Fadhillah: Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam al-Farabbi*. Jakarta: PT Kinta
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 1984. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayat Al-quran*. Mesir: Dar al-Fikr
- Internet, 21 Januari 2016, tersedia dalam: <http://harapantiadaakhir.blogspot.co.id/201.1/11/sistem-pemerintahan-islam-pada-masa.html>
- Internet, 21 Januari 2016, tersedia dalam: <http://www.republika.co.id/berita/hortlink/61542>
- Khaeruman, Badri. 2014. *Ulum al-Hadits*. Bandung: Pustaka Setia
- Ma'arif, Syafi'i. 1996. *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES
- Madjid, Nurcholis. 1983. “Cita-cita Politik Kita”. Makalah

- Pulungan, J. Suyuthi 1997. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah & Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press
- Siradj, Sayyid Aqil. 1999. *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*. Jakarta: Pustaka Ciganjur
- Watt. W. Montgomery. 1961. *Muhammad Prophet and Statesman*. Oxford University Press